

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH

Oleh:

**RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM. 2103021031**



**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT
PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM. 2103021031

Pembimbing : Agus Trioni Nawa, M.Pd.

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM : 2103021031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH

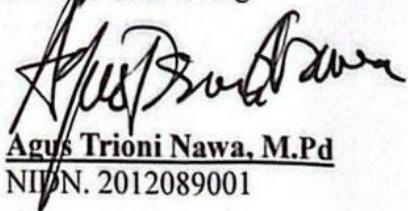
Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 11 September 2025

Dosen Pembimbing


Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

HALAMAN PERSETUJUAN

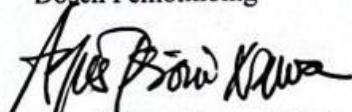
Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH
Nama : RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM : 2103021031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 11 September 2025

Dosen Pembimbing



Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111,

Tlp (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0966/Un.36.3/D/PP.00.9/12/2025

SKRIPSI dengan judul: IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH, disusun oleh: Raka Tri Oktaf Putra, NPM: 2103021031, Prodi: Perbankan Syariah, telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/17 Desember 2025.

TIM PEMBAHAS:

Ketua Sidang : Agus Trioni Nawa, M.Pd

(.....)

Pengaji 1 : Muhammad Ryan Fahlevi, M.M

(.....)

Pengaji 2 : Atika Ria Sari, M.BA

(.....)

Sekretaris : Primadatu Deswara, SKM.,MPH

(.....)



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH

Oleh:
Raka Tri Oktaf Putra

Good Corporate Governance (GCG) pada lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai aturan dan sistem dalam mengelola serta menjalankan operasional lembaga keuangan. Namun, dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah sering menghadapi permasalahan risiko kredit yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah dan berpengaruh terhadap stabilitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi GCG masih menghadapi tantangan, khususnya dalam efektivitas manajemen risiko kredit. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara penerapan prinsip GCG dengan pengelolaan risiko kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah, sebuah pendekatan yang belum banyak diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip GCG dalam manajemen risiko kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan Direktur dan Kepala Bagian Pembiayaan, serta diperkuat dengan dokumentasi kebijakan dan laporan internal bank.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan GCG pada BPRS Rajasa telah dijalankan sesuai dengan lima prinsip utama (*Transparency, Accountability, Independence, Responsibility, and Fairness*). Transparansi diwujudkan dalam keterbukaan laporan dan kebijakan, akuntabilitas melalui struktur organisasi dan evaluasi kinerja, pertanggungjawaban ditunjukkan dengan kepatuhan pada regulasi serta pelaksanaan program sosial, independensi terlihat dari proses keputusan kredit yang bebas intervensi, dan kewajaran diterapkan dengan perlakuan setara kepada semua pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan risiko kredit, bank menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) serta pengawasan melalui unit manajemen risiko. Implementasi GCG terbukti membantu meminimalisir risiko kredit, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, dan ketiadaan sistem peringatan dini. Dengan demikian, penerapan GCG berperan penting dalam mendukung efektivitas manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Manajemen risiko kredit, BPRS Rajasa.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raka Tri Oktaf Putra

NPM : 2103021031

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Desember 2025
Yang menyatakan,



Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031

MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“*Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya*”

(Q.S.An-Najm: 39)

Kita butuh kesulitan untuk tumbuh. Dari penderitaan itulah lahir kekuatan.

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terukur kepada Allah SWT. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Papah Joko Sundari dan Mamah Mursiami yang saya sayangi dan hormati, yang senantiasa mendoakan dalam setiap helaan nafas, memberikan kasih sayang yang tak pernah hilang, *support system* yang Allah SWT kirim untuk mendukung keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Kepada kakak Reno Dwi Anggara dan Adik tercinta Aldila Azisya Pratiwi yang selalu memberikan senyum lebarnya sebagai penyemangat, dukungan dan doa yang tulus untuk keberhasilan serta pelajaran hidup.
3. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, dukungan, motivasi dan juga tempat ternyaman kedua untuk berdiskusi tentang kehidupan setelah ibuku.
4. Teruntuk bapak David Ahmad Yani, M.M, ku ucapkan persembahan teristimewa kepada Dosen Pembimbing Akademik saya, yang dengan kesabaran, ketegasan, dan penuh perhatian selalu membimbing saya, tidak hanya dalam perkuliahan, tetapi juga dalam mengarahkan jalan hidup akademik saya.
5. Teruntuk Diah Agustiana sebagai teman baik. Terimakasih sudah menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu menjadi suport dan menemani keluh kesah selama mengerjakan skripsi.

6. Teman seperjuangan divisi futsal, Firdaus, Mahendra, Haris, Arman dan Nufus yang luar biasa, selalu bersama memperjuangkan prestasi futsal dan mengharumkan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, kalian luar biasa selalu memberikan semangat dan tak kenal menyerah.
7. Untuk teman-teman ku sahabatku yang tidak bisa saya sebut satu-satu Terimakasih telah memberi dukungan dan menemaniku selama masa perkuliahan yang cukup berkesan ini. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Risiko Kredit Pada Bprs Rajasa Lampung Tengah”. sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Anggoro Sugeng, SEI., M.SH.Ec., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak David Ahmad Yani, M.M, . selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd, selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pihak-pihak yang ikut membantu dalam memberikan pengetahuan dan motivasinya. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 9 Desember 2025
Peneliti,



Raka Tri Oktaf Putra
NPM.2103021031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relavan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Good Corporate Governance (GCG)	11
1. Pengertian Good Corporate Governance	11
2. Prinsip Prinsip Good Corporate Governance	13
3. Penerapan Good Corporate Governance	14
B. Manajemen Risiko Kredit	16
1. Pengertian Manajemen Risiko Kredit	16
2. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko	17
3. Klasifikasi Risiko Kredit Berdasarkan Jangka Waktu	18

4. Peran <i>Credit Risk Management</i> (CRM) dan <i>Relationship Management</i> (RM) dalam Pengendalian Risiko Kredit	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	22
C. Teknik Pengumpul Data.....	23
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum BPRS Rajasa Lampung Tengah.....	28
1. Sejarah BPRS Rajasa Lampung Tengah	28
2. Visi dan Misi BPRS Rajasa Lampung Tengah	29
3. Produk BPRS Rajasa Lampung Tengah.....	30
4. Struktur BPRS Rajasa Lampung Tengah	31
B. Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> BPRS Rajasa Lampung Tengah.....	33
1. Transparansi (<i>Transparency</i>)	33
2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	36
3. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>).....	38
4. Independensi (<i>Independency</i>)	40
5. Kewajaran (Fairness).....	42
C. Manajemen Risiko Kredit Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah	43
1. <i>Character</i> (Karakter).....	44
2. <i>Capacity</i> (Kapasitas)	46
3. <i>Capital</i> (Kapital)	47
4. <i>Colateral</i> (Angunan).....	48
5. <i>Condition</i> (Kondisi).....	50
D. Pembahasan	51

BAB V PENUTUP **58**

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HDIUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur BPRS Rajasa Lampung Tengah.....	32
Gambar 4.2 Publikasi Informasi Keuangan dan Laporan Tata Kelola Perusahaan Tahunan.....	34
Gambar 4.3 Kegiatan Penyerahan Dana CSR BPRS Rajasa Lampung Tengah ...	40
Gambar 4.4 RUPS Sebagai Bentuk Pengambilan Keputusan Secara Independen	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Prasurvey
5. Surat Balasan Prasurvey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Laporan Tata Kelola Perusahaan
11. Blangko Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah memiliki peran strategis, terutama dalam memberikan layanan pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹

Namun, seiring pertumbuhan tersebut, BPRS juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal tata kelola dan manajemen risiko. Salah satu bentuk risiko yang paling dominan adalah risiko kredit, yaitu risiko gagal bayar oleh nasabah yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas dan keberlangsungan operasional bank. Risiko ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan pembiayaan, tetapi juga dapat menggoyahkan stabilitas operasional lembaga secara keseluruhan.²

Dalam konteks manajemen perbankan, manajemen risiko kredit merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit. Tujuan utamanya adalah untuk

¹ Ascarya Dan Yumanita, Diana. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Pendekatan Praktik Dan Teori*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020. 45.

² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 19–20.

meminimalisir potensi kerugian yang berasal dari kegagalan pembayaran oleh debitur. Pengelolaan risiko kredit yang efektif membutuhkan strategi, alat ukur risiko (seperti *scoring system*), evaluasi portofolio kredit, hingga prosedur penanganan pemberian bermasalah.³

Untuk mendukung pengelolaan risiko kredit yang baik serta dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan regulasi, diperlukan sistem tata kelola yang kuat melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* merupakan sistem tata kelola yang mengedepankan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, namun juga sebagai langkah mitigatif terhadap risiko-risiko perbankan seperti risiko kredit, likuiditas, operasional, hingga risiko kepatuhan terhadap regulasi.⁴

Di sisi lain, BPRS sebagai lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk menerapkan pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti amanah, keadilan, dan keterbukaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقْوُا اللَّهَ وَلَنْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَتَقْوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 132.

⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (Knkg), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Edisi Revisi 2021, 12-14..

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Hasyr: 18).⁵

Ayat ini mengandung pesan penting tentang ketakwaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab atas setiap tindakan, baik secara spiritual maupun praktikal. Nilai-nilai ini sangat relevan, terutama dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko kredit. Dalam konteks GCG, ayat ini menegaskan nilai akuntabilitas dan transparansi. Setiap pihak dalam lembaga keuangan dituntut untuk bertanggung jawab atas amanahnya, serta terbuka dalam pelaporan risiko dan pengelolaan keuangan demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas bank. Sementara dalam manajemen risiko kredit, ayat ini mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar di masa depan. Bank perlu mengantisipasi kemungkinan kerugian sebagai bentuk ikhtiar mempersiapkan “hari esok”.

BPRS Rajasa Lampung Tengah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasionalnya. Hal ini tercermin dalam keterbukaan informasi kepada *stakeholders*, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kinerja, independensi dalam pengambilan keputusan, serta penerapan pengawasan dan pengendalian risiko yang efektif. Dalam pengelolaan manajemen risiko, transparansi menjadi elemen utama yang diwujudkan melalui pengungkapan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020.

risiko, penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, serta konsistensi dalam pelaporan strategi mitigasi risiko.⁶

Berdasarkan wawancara dengan manajemen BPRS Rajasa Lampung Tengah, diketahui bahwa pihak manajemen telah menjalankan berbagai upaya dalam penguatan sistem tata kelola dan pengendalian risiko, seperti pembentukan unit *Credit Risk Management* (CRM) dan *Relationship Management* (RM), penyusunan prosedur kredit yang sistematis, serta pelaporan risiko yang transparan kepada pemangku kepentingan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip GCG dan teknik manajemen risiko kredit secara mendalam, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam deteksi risiko, serta lemahnya sistem pengawasan internal yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kredit bermasalah.⁷

Selain itu, belum tersedianya sistem peringatan dini (*early warning system*) yang andal untuk mendeteksi potensi gagal bayar, serta kurangnya integrasi antara unit manajemen risiko dengan unit bisnis turut menghambat efektivitas pengendalian risiko kredit. Beberapa prosedur mitigasi yang ada juga belum berjalan maksimal, seperti pemantauan berkala terhadap kualitas aset pembiayaan dan evaluasi terhadap nasabah bermasalah, sehingga berisiko menurunkan kinerja keuangan dan reputasi bank.

⁶ Sugiharto, Bambang. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Manajemen Risiko Bank Syariah." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 15 No. 2, 2011, 165.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Manajemen BPRS Rajasa Lampung Tengah, 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi GCG belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko kredit secara menyeluruh. Masalah-masalah tersebut mencerminkan bahwa sistem manajemen risiko yang seharusnya menjadi garis pertahanan utama dalam menghadapi risiko kredit masih menghadapi tantangan struktural dan teknis.

Risiko gagal bayar atau kredit macet tidak hanya berdampak pada nasabah, tetapi juga memberikan konsekuensi bagi BPRS Rajasa Lampung Tengah. Dampak tersebut antara lain penurunan kualitas aset produktif, meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*), menurunnya tingkat profitabilitas bank, serta berkurangnya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru. Selain itu, tingginya risiko kredit juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan reputasi BPRS, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha bank.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih dalam dengan tujuan untuk menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah, mengidentifikasi efektivitas pelaksanaannya, serta menggali hambatan-hambatan yang dihadapi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem tata kelola dan manajemen risiko di sektor perbankan syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Islam.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul “**Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko Kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Risiko Kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu manajemen, khususnya dalam bidang *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik, serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi:

1) Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi akademik dan praktis dalam memahami implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit, khususnya dalam konteks perbankan syariah.

2) Bagi BPRS Rajasa Lampung Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana implementasi prinsip *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan secara efektif dalam manajemen risiko kredit.

3) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS, khususnya dalam menjamin keamanan dan kelancaran transaksi pembiayaan.

D. Penelitian Relawan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara subtansif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Adapun peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh:

1. Penelitian yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)”.⁸

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* telah diterapkan cukup baik, namun prinsip profesionalisme masih lemah, terbukti dari meningkatnya NPF akibat analisis nasabah yang kurang cermat. Dari perspektif manajemen syariah, *Good Corporate Governance* sudah sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan musyawarah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas implementasi *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko di BPRS, menggunakan pendekatan kualitatif, dan menekankan pentingnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam mencegah risiko pembiayaan. Namun, perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada pembiayaan musyarakah dan memakai perspektif manajemen syariah. Sedangkan penelitian saya membahas manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

⁸ Dennisha Amalia Dewi, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Pada Bprs Lantabur Tebuireng Jombang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

2. Penelitian yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu”.⁹

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui budaya kerja manajerial telah dilaksanakan, namun belum maksimal terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan risiko yang belum optimal dalam menghadapi tantangan lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti implementasi *Good Corporate Governance* dalam konteks manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Keduanya juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas dalam menunjang efektivitas manajemen risiko. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian tersebut dilakukan pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro, sedangkan penelitian saya berfokus pada manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah sebagai lembaga perbankan syariah formal.

3. Penelitian yang berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Risiko pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.¹⁰

⁹ Nila Umailatul Fitri, "Implementasi *Good Corporate Governance (Gcg)* Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Bmt-Ugt Sidogiri Cabang Pringsewu" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2018).

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BPRS Lantabur Tebuireng telah berjalan dengan baik, terutama pada empat aspek: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Namun, aspek independensi dalam pengambilan keputusan pembiayaan masih kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan manajemen risiko pembiayaan.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko pada BPRS. Keduanya menekankan pada pentingnya implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko pembiayaan dan objek penelitian yang melibatkan BPRS. Namun, perbedaannya terletak pada focus dan lokasi Penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada manajemen risiko di BPRS Lantabur Tebuireng, sedangkan penelitian saya membahas manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki perbedaan yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Risiko Kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah” belum pernah diteliti sebelumnya.

¹⁰ Nurid Fadhilatul B. M., Nurul Hanani, Dan Sri Dwi Estiningrum, “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Manajemen Risiko Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah,” Wadiyah: *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli 2018, 113.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka.¹ Dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* juga memerlukan langkah panjang dalam penerapan prinsip-prinsip yang menanamkan nilai-nilai yang membentuk proses budaya dalam pengelolaan *Good Corporate Governance* Perusahaan.² Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui laba yang dihasilkan, perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, mendorong pertumbuhan perusahaan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

¹ Franita Riska, Mekanisme *Corporate Governance* Dan Nilai Perusahaan, (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Aqli, 2019), 2.

² Indah Permata Sari, “Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan”. Juripol, 4.1 (2021), 90-97.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Sejak diperkenalkan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), prinsip-prinsip *corporate governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah Transparansi (*Transparency*), Kemandirian (*Independency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), dan Kewajaran (*Fairness*), yaitu:³

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang

³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020. 127.

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran merupakan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Transparansi memastikan keterbukaan informasi, Kemandirian menjamin pengelolaan bebas intervensi, Akuntabilitas menegaskan kejelasan fungsi dan tanggung jawab, Pertanggungjawaban menekankan kepatuhan hukum serta kedulian sosial, dan Kewajaran menjamin perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan kelima prinsip ini, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko bisnis, dan menciptakan lingkungan usaha yang stabil serta kompetitif.

3. Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa proses pengelolaan risiko di perusahaan, termasuk di lembaga keuangan syariah seperti BPRS, berjalan dengan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.⁴ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini tidak hanya menjadi indikator tata kelola yang baik, tetapi juga fondasi dalam membangun sistem manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan.

Implementasi *Good Corporate Governance* dimulai dari komitmen pimpinan tertinggi perusahaan, pembentukan struktur organisasi yang mendukung fungsi pengawasan dan pelaksanaan, serta penyusunan kebijakan operasional yang konsisten dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya transparansi informasi, pelaporan yang akurat, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam menghadapi risiko-risiko yang melekat dalam kegiatan operasional.⁵

Dalam konteks manajemen risiko, *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai kerangka kerja yang menuntut keterbukaan informasi terkait eksposur risiko, penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses mitigasi, serta independensi dari pihak-pihak yang

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). Peraturan Ojk Nomor 57/Pojk.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik. Jakarta: Ojk. 2021.

⁵ Hasanah, U. & Wibowo, A. “*Good Corporate Governance* Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 2022, 65–78.

melakukan penilaian risiko. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* sangat erat kaitannya dengan efektivitas sistem manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara menyeluruh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* yang efektif mendorong pembentukan unit khusus seperti Komite Manajemen Risiko atau Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Unit ini bertugas mengembangkan kebijakan pengendalian risiko dan memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan telah melalui evaluasi risiko yang matang sebelum diimplementasikan.⁶ Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi bagian integral dalam implementasi *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkala agar karyawan mampu memahami dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola serta kebijakan risiko secara profesional dan bertanggung jawab.⁷

Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan (*compliance*), tetapi juga sebagai strategi manajerial yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan perusahaan terhadap berbagai tantangan risiko.

⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance (Knkg), Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Edisi Revisi 2021, 12.

⁷ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 95.

B. Manajemen Risiko Kredit

1. Pengertian Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas operasional serta keberlangsungan bisnis. Risiko yang dimaksud mencakup berbagai bentuk, mulai dari risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko kredit yang merupakan fokus utama dalam sektor pembiayaan dan kredit.⁸

Dalam konteks perbankan syariah maupun konvensional, manajemen risiko kredit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proses penyaluran pembiayaan atau pemberian kredit berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.⁹

Dengan kata lain, resiko kredit adalah resiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Dimana berhubungan dengan pihak peminjam yang tidak mampu memenuhi kewajiban pada bank pada saat jatuh tempo. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan (pembiayaan) aktivitas

⁸ Wayan Gde Iswara, *Manajemen Risiko Untuk Lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2016), 101.

⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 18.

treasury (penempatan dana antar bank), membeli obligasi korporasi), aktivitas investasi dan pembiayaan perdagangan.

2. Prinsip Prinsip Manajamen Risiko Kredit

Dalam menghadapi risiko yang terjadi maka kita bisa menerapkan prinsip 5C yang bisa digunakan sebelum memberikan pinjaman, dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya. Diantaranya:¹⁰

- a. *Character*, yang artinya melihat karakter calon nasabah dikoperasi, yang gunanya untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur dan mau berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara koperasi melihat karakter calon nasabahnya yaitu dengan cara melakukan wawancara saat calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dan juga pihak koperasi bisa menanyakan sifat calon nasabah kepada orang sekitar.
- b. *Capacity*, yang artinya melihat usaha melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasinya kesulitannya.

¹⁰ Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Ashlihah "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah di dalam Koperasi Syariah" *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, no. 2 (2022) 46.

- c. *Capital*, yang artinya modal yang dimiliki oleh nasabah, biasanya dilihat dari pendapatan yang di dapat nasabah per bulannya dan akan dikurangi dengan pendapatan. Bisa juga dengan melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan nasabah. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa platfon yang layak diberikan.
- d. *Collateral*, yang artinya melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak Koperasi. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternative terakhir untuk permasalahan pembiayaan.
- e. *Condition*, yang artinya mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari nasabah, karena ada usaha yang sangat bergantung dengan kondisi ekonomi.

3. Klasifikasi Risiko Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

Dalam manajemen risiko kredit, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Risiko ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:¹¹

- a. Risiko Kredit Jangka Pendek (*Short-Term Risk*)

Risiko Kredit Jangka Pendek merupakan risiko yang muncul ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, terutama yang berkaitan dengan likuiditas.

¹¹ Isra Misra, Sofyan Hakim, dan Agus Pramana. *Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: K-Media, Graha Ilmu, 2020, 14.

Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh arus kas yang tidak seimbang, ketidaktepatan manajemen keuangan, atau gangguan sementara dalam operasional perusahaan. Risiko ini umumnya berkaitan dengan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

b. Risiko Kredit Jangka Panjang (Long-Term Risk)

Risiko Kredit Jangka Panjang adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya, seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, atau penyelesaian proyek besar yang memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Risiko ini lebih kompleks karena melibatkan perencanaan strategis, kemampuan menjaga kesinambungan bisnis, serta faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan regulasi.

Dengan demikian, risiko kredit dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Risiko jangka pendek berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban likuiditas dalam waktu dekat, sedangkan risiko jangka panjang menyangkut kegagalan melunasi kewajiban jangka panjang dan proyek besar. Keduanya perlu dikelola secara tepat untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga.

4. Peran *Credit Risk Management* (CRM) dan *Relationship Management* (RM) dalam Pengendalian Risiko Kredit

Dalam melaksanakan setiap keputusan kredit prinsip kehati-hatian harus atau diutamakan dengan maksud untuk selalu menciptakan suatu

kondisi yang terkontrol dan aman.¹² Salah satu pejabat di lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit adalah bagian *Credit Risk Management* (CRM) dan *Relationship Management* (RM). Dimana dua bagian ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Adapun tanggung jawab dari kedua bagian ini adalah:

a. *Credit Risk Management* (CRM)

Pihak *Credit Risk Management* memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengendalikan risiko kredit. Adapun tugas-tugas spesifik dari *Credit Risk Management*, meliputi:¹³

- 1) Memiliki tanggung jawab utama dalam bidang mengendalikan risiko kredit.
- 2) Memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah.
- 3) Memiliki tanggung jawab dalam memanajemen portofolio kredit.
- 4) Berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian (*parameter scoring system*) serta alat analisis yang bisa atau layak digunakan. Biasanya setiap lembaga perbankan atau lembaga simpan pinjam menerapkan sistem resiko penilaian yang berbeda-beda berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut dan mereka melaksanakannya secara bertahap (*step by step*) dan sistematis.

¹² Irham Fahmi, *Manajemen Resiko*, 20.

¹³ Isra Misra, Sofyan Hakim, dan Agus Pramana. *Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, 14.

b. *Relationship Management* (RM)

Sementara itu, pihak *Relationship Management* lebih berfokus pada aspek hubungan bisnis dan kelanjutan usaha nasabah. Adapun tanggung jawab *Relationship Management*, meliputi:¹⁴

- 1) Pada saat menemukan adanya kredit yang bermasalah maka memidahkan pengelolaanya kebagian *Credit Risk Management* untuk diselesaikan.
- 2) Pihak *Relationship Management* berfungsi dalam mempertanggungjawabkan berkelajutan bisnis/usaha perbankan.
- 3) Pihak *Relationship Management* saling berkordinasi dengan pihak *Credit Risk Management* dalam memutuskan berbagai persoalan penting.

Dengan demikian, *Credit Risk Management* (CRM) dan *Relationship Management* (RM) berperan penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian kredit. CRM fokus pada pengendalian dan penyelesaian risiko kredit, sementara RM menjaga hubungan bisnis dan koordinasi dengan CRM. Sinergi keduanya memastikan proses kredit berjalan aman dan terkendali.

¹⁴ Ibid., 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan memahami suatu fenomena dalam konteks alamiah.¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik tertentu.²

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, agar memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus tunggal, yaitu implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap dinamika serta praktik yang terjadi secara nyata di lapangan.

B. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian, baik

¹ Lexy J Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2020), 26.

² Wina Sanjaya, “*Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 59.

melalui wawancara dan dokumentasi, serta alat lainnya yang merupakan data primer.³ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari enam informan, masing-masing terdiri dari satu orang Direktur dan satu orang Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa yang terlibat dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, yaitu: pedoman internal bank, laporan manajemen risiko, dan arsip prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur ilmiah, seperti jurnal, buku referensi, artikel, dan dokumen regulasi OJK yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit di lembaga keuangan syariah, sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis data.

C. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

³ Mahmud, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Pustaka Setia: Bandung, 2021), 146.

⁴ *Ibid.*

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua pihak untuk memperoleh informasi dan makna dari topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, sesuai dengan pendapat Esterberg, yaitu teknik yang digunakan saat peneliti telah mengetahui informasi yang dibutuhkan.⁵ Wawancara dilakukan secara terencana menggunakan pedoman pertanyaan agar tetap fokus pada topik, yaitu: implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Narasumber terdiri atas satu orang direktur dan satu orang kepala bagian pembiayaan BPRS Rajasa terlibat dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶ Metode ini dilakukan untuk mengambil data yang mendukung, yaitu: laporan internal, dan dokumen yang berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Alfabeta: Bandung 2020), 224.

⁶ Sugiyono, “*Statistika Untuk Penelitian*,” (Bandung: Alfabeta, 2020), 274.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan mengetahui kredibilitas data yang telah terkumpul selama proses penelitian.⁷ Salah satu teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data dari sudut pandang atau sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari enam narasumber utama yang terlibat langsung dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit, yaitu: satu orang direktur dan satu orang kepala bagian pembiayaan, BPRS Rajasa Lampung Tengah.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *Data Collecting, Data Reducting, Categorizing, Coding, Data Displaying dan Conclusion Drawing*.⁸

1. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)

Proses awal yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, khususnya melalui wawancara mendalam

⁷ Lexy J. “Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif”, 324.

⁸ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”, 246

kepada narasumber, serta dokumentasi terkait implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

2. *Data Reducting* (Reduksi Data)

Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi yaitu memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berulang akan dieliminasi, sementara informasi penting akan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut.

3. *Categorizing* (Kategorisasi)

Data yang telah direduksi kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu: Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran), Identifikasi risiko, dan Strategi mitigasi risiko kredit.

4. *Coding* (Pemberian Kode)

Setiap kategori data diberikan kode tertentu untuk memudahkan dalam identifikasi dan analisis tematik, yaitu: “GCG-T” untuk transparansi, “MR-ID” untuk identifikasi risiko, atau “SMR” untuk strategi mitigasi risiko kredit. Teknik ini membantu peneliti dalam menemukan pola, keterkaitan, dan kecenderungan yang muncul dari data.

5. *Data Displaying* (Penyajian Data)

Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.⁹ Penyajian disusun sesuai fokus penelitian untuk menggambarkan realitas implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko kredit di lapangan.

6. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dianalisis.¹⁰ Kesimpulan ini mencerminkan pemahaman mendalam peneliti terhadap Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko kredit, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan juga diverifikasi secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian.

⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, 249.

¹⁰ *Ibid.*,252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Rajasa Lampung Tengah

1. Sejarah BPRS Rajasa Lampung Tengah

BPRS Rajasa merupakan bank milik pemerintah daerah Lampung Tengah yang saat ini terus berkembang untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat. saat ini bank syariah rajasa memiliki 6 kantor kas yang tersebar dibeberapa wilayah kecamatan di Lampung Tengah, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam akses perbankan syariah. BPRS Rajasa berdiri sejak tahun 2008 yang tertuang pada PERDA Kabupaten Lampung Tengah No. 07 Tahun 2007, kantor pertama BPRS Rajasa terletak di Jl. Proklamator Raya No.9 Bandar jaya.

BPR Syariah Rajasa merupakan perusahaan milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar Rp 10.000.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah harus berbadan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan pengesahan Menteri Hukum Hak Asasi Nomor AHU- 32708. AH,01,01, Tanggal 29 Mei 2010, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dengan modal dasar pemerintah daerah sekecil-kecilnya Rp 10.000.000.000 atau 80% dan modal pihak ke 3 sebesar-besarnya 20% atau Rp 2.000.000.000.

Hingga saat ini Bank Syariah Rajasa mengalami perubahan-perubahan diantaranya perubahan nama yang telah ditetapkannya pada PERDA Kabupaten Lampung Tengah No. 01 Tahun 2021 tentang PT. Perseroda BPRS Rajasa Kabupaten Lampung Tengah, perubahan ini berlaku efektif mulai 01 Maret 2021. Selain perubahan tersebut, saat ini bank syariah rajasa memiliki 6 kantor kas antara lain: kantor kas Kalirejo, kantor kas Rumbia, kantor kas Punggur, kantor kas Bandar Mataram, kantor kas Bumi Ratu Nuban, dan kantor kas Terusan Nunyai yang terletak di beberapa kecamatan di Lampung Tengah.

2. Visi dan Misi BPRS Rajasa Lampung Tengah

Berdasarkan visi dari BPRS Rajasa Lampung Tengah adalah terwujudnya BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah yang profesional dan sehat sebagai mitra perekonomian umat menuju masyarakat madani. Dengan misi mewujudkan organisasi dan SDI yang sehat, maju dan profesional, melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, mengembangkan kegiatan ekonomi umat pada sektor UMKM dan sektor lainnya, menciptakan kemitraan bermuamalah yang amanah, kehati-hatian dan profesional Menggalang dana ZIS yang menyeluruh dan transparan dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah.

3. Produk BPRS Rajasa Lampung Tengah

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah antara lain produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan dan deposito meliputi:

- a. TAWAR (Tabungan Wadiah Rajasa).
- b. TARISA (Tabungan Arisan Tahunan)
- c. TAHARA (Tabungan untuk keperluan keberangkatan haji).
- d. TASIRA/Tabungan Pendidikan
- e. TAQUR (Tabungan Qurban)
- f. Deposito Rajasa Syariah

Selain itu ada juga produk pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah sebagai berikut.

- a. Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Lampung Tengah untuk mengembangkan UMKM di Lampung Tengah.
- b. Pembiayaan Mitra Usaha Rajasa (MURAH), pembiayaan tanpa agunan s.d Rp 5.000.000 bagi nasabah UMKM yang sudah rutin menabung di Rajasa.
- c. Pembiayaan Kepemilikan Emas untuk pembelian Logam Mulia ataupun Emas Perhiasan (PKE EMAS).
- d. Pembiayaan yang diberikan kepada ASN/Karyawan Honorer yang memiliki payroll (ASN/Karyawan), Pembiayaan yang ditujukan bagi guru yang memiliki tunjangan sertifikasi (Sertifikasi Guru).

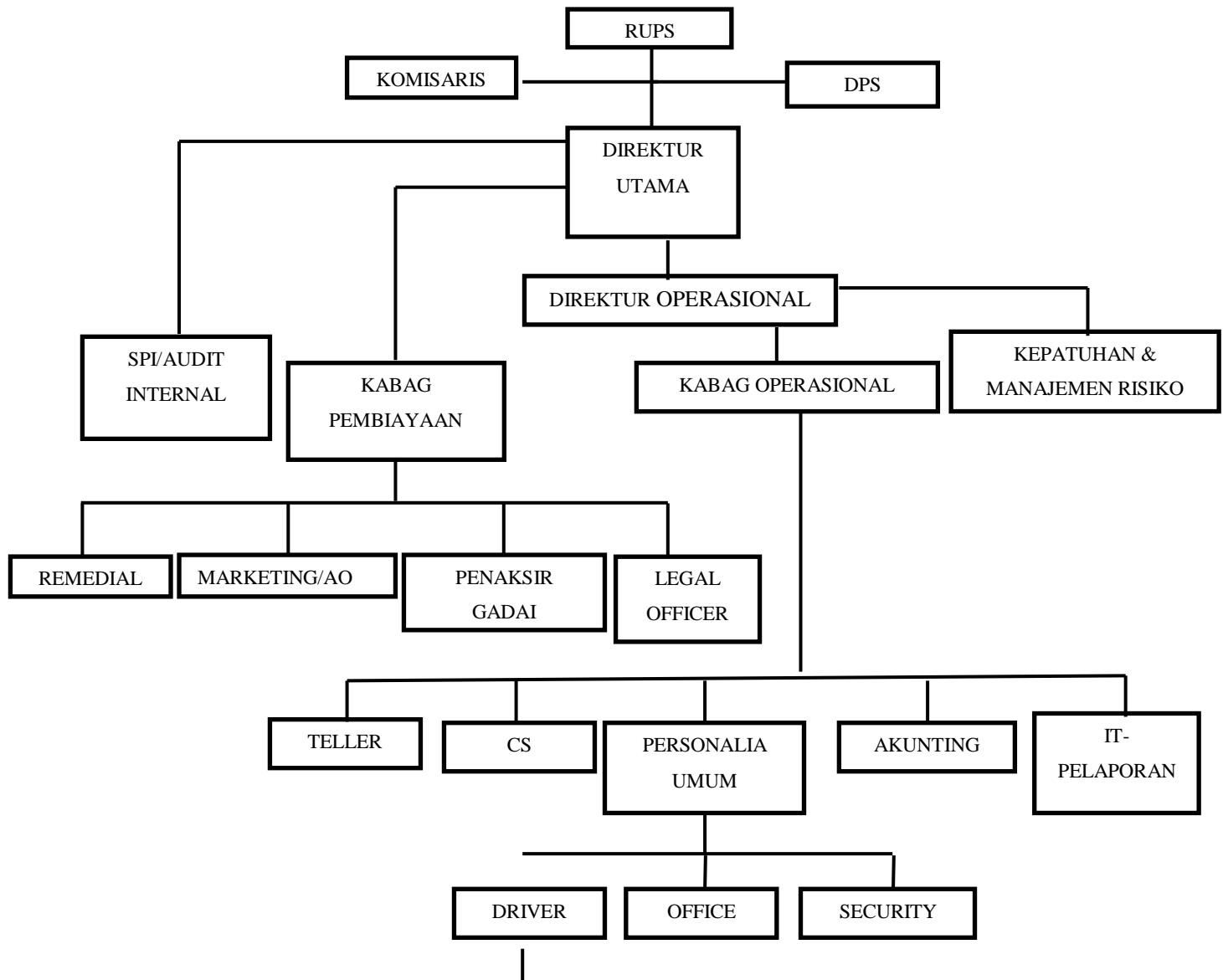
- e. Pembiayaan gadai dengan jaminan emas (Rajasa Rahn) yang dilakukan sesuai prinsip syariah, Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat umum yang memiliki usaha/umkm (Umum/UMKM).
- f. Pembiayaan dana talangan haji diberikan kepada nasabah untuk keberangkatan haji (Tabungan Haji),
- g. Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor baru atau bekas (Rajasa Oto).¹

4. Struktur BPRS Rajasa Lampung Tengah

Seiring waktu, struktur BPRS Rajasa berkembang dari kantor pusat dan sedikit staff, kini menjadi organisasi dengan direksi lengkap, dewan komisaris, pengawas syariah, unit kepatuhan & audit, serta manajemen pembiayaan. Ditunjang oleh SDM yang terus didorong melalui pelatihan, serta ekspansi kantor kas & inovasi digital, BPRS Rajasa Lampung Tengah tumbuh menjadi bank syariah BUMD yang tangguh, modern, dan berkontribusi nyata pada perekonomian daerah.

¹ “Produk,” *BPRS Rajasa*, t.t., diakses 16 Agustus 2025, <https://bprsrajasa.co.id/produk/>.

Gambar 4.1 Struktur BPRS Rajasa Lampung Tengah



Sumber: Dokumentasi Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah

B. Implementasi Prinsip Good Corporate Governance BPRS Rajasa Lampung Tengah

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irna Puspasari Siregar selaku direktur berkaitan dengan penerapan prinsip transparasi mengatakan bahwa:

*“Transparansi dijalankan secara terbuka di BPRS. Informasi ke pemangku kepentingan atau stakeholders juga disampaikan lewat apa? sosialisasi kebijakan, termasuk laporan keuangan, kondisi kesehatan perusahaan, dan tata kelola. Biar informasi yang dibagikan akurat, lengkap, dan tepat waktu”.*²

Pemenuhan terhadap komitmen regulasi yang berlaku, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, menjadi landasan utama dalam menjamin bahwa setiap informasi yang dikomunikasikan tidak hanya memenuhi standar legal-formal, tetapi juga mencerminkan transparansi dan tanggung jawab manajerial yang tinggi.

Dalam menjalankan fungsi komunikasi yang efektif dan akuntabel, perusahaan memanfaatkan berbagai media sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik dan nasabah. Ibu Irna Puspasari Siregar

² Wawancara dengan Ibu Irna Puspasari Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

mengatakan :

*“Medianya macem-macem, ada website resmi perusahaan, media cetak di dalam dan luar kantor, sama koran yang banyak dibaca orang. Website itu dipakai biar info bisa dikasih langsung, lengkap, dan gampang diakses kapan aja. Kalau media cetak sama koran, itu buat nyampein info ke orang-orang yang belum terlalu sering online, sekalian biar pesan penting dari perusahaan makin nyampe”.*³

Transparansi ditunjukkan melalui publikasi laporan keuangan tahunan serta kebijakan internal yang disosialisasikan kepada nasabah maupun pemangku kepentingan. BPRS Rajasa Lampung Tengah menampilkan laporan keuangan dan kebijakan perusahaan di papan pengumuman kantor serta website resmi agar dapat diakses oleh masyarakat.⁴

Gambar 4.2 Publikasi Informasi Keuangan dan Laporan Tata Kelola Perusahaan Tahunan

Informasi Keuangan

Informasi keuangan berikut telah disusun untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparasi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan, Tata Kelola dan Laporan Keuangan Publikasi BPR. Berikut adalah laporan keuangan PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH beberapa periode terakhir :

Tahun 2025

- Triwulan II 2025
- Triwulan I 2025

Tahun 2024

- Triwulan IV 2024
- Triwulan III 2024
- Triwulan II 2024
- Triwulan I 2024

Tahun 2023

Laporan Tata Kelola Perusahaan

PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH telah melaksanakan dan menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar dengan berlandaskan sikap kehati-hatian serta manajemen yang sehat. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesungguhnya telah ditanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan serta perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis perbankan. Prinsip GCG sebagaimana yang telah diterapkan di PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan antara lain diambil dari Kode Etik Tata Kelola Perusahaan serta prinsip-prinsip yang dikandung dalam GCG. Berikut ini adalah laporan Good Corporate Governance PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH :

- Laporan Tata Kelola Perusahaan Desember - 2024
- Laporan Tata Kelola Perusahaan Desember - 2023
- Laporan Tata Kelola Perusahaan Desember - 2022

Sumber: Website Resmi BPRS Rajasa Lampung Tengah

³ Wawancara dengan . Ibu Irna Puspasari Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

⁴ BPRS Rajasa, t.t., diakses 3 September 2025, <https://bprsrajasraja.co.id/pengumuman/>.

Melalui kombinasi media tersebut, perusahaan tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas transparansi, kredibilitas, dan keterbukaan terhadap publik dan nasabah, yang pada akhirnya mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik serta membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan transparansi informasi, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang memerlukan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Ibu Irna Puspasari Siregar mengatakan bahwa :

“Salah satu masalah yang sering kejadian itu info penting nggak nyampe-nyampe ke orang yang butuh. Padahal harusnya jelas, lengkap, dan tepat waktu. Biasanya sih gara-gara koordinasi antar bagian kurang, ada yang kemampuan komunikasinya masih kurang, atau medianya emang nggak mendukung.”⁵

Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan perlu secara konsisten melakukan monitoring dan pemantauan terhadap arus komunikasi internal dan eksternal, mengadakan rapat koordinasi secara berkala guna menyelaraskan pemahaman antar bagian, serta menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk membangun budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif, sekaligus memperkuat mekanisme kontrol informasi agar setiap pesan yang disampaikan dapat diterima secara utuh, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan mendukung terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

⁵ *Ibid.*

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan jelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur organisasi dipandang sebagai hal yang penting untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Irna Puspasari Siregar mengatakan bahwa:

“Struktur organisasi di perusahaan itu nggak cuma buat gaya-gayaan atau formalitas doang, tapi emang penting buat bagi-bagi tugas, wewenang, sama tanggung jawab tiap orang atau divisi. Tujuannya biar kerjaan rapi, nggak tumpang tindih, dan semua tahu bagiannya. Makanya perlu banget jobdesc yang jelas dan sesuai kemampuan orangnya.”⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa struktur organisasi bukan hanya bersifat formalitas, melainkan memiliki fungsi nyata dalam memastikan keteraturan pekerjaan. Pembagian wewenang dilakukan secara proporsional agar keputusan tetap efektif namun dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan job description yang sesuai dengan kompetensi karyawan memungkinkan terciptanya produktivitas, transparansi, serta pencapaian tujuan perusahaan secara lebih terarah. Selain itu, kinerja pegawai biasanya dievaluasi dengan menggunakan sistem laporan Key Performance Indicators (KPI) sebagai instrumen pengukuran.

⁶ Wawancara dengan . Ibu Irna Puspasari Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

KPI (*Key Performance Indicators*) digunakan sebagai alat ukur yang objektif dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta produktivitas tim bisnis dalam menjalankan tanggung jawab operasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya mekanisme pelaporan kinerja yang berbasis KPI dan dilakukan secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan searah dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas kinerja yang telah dicapai selama satu periode tahun buku.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan pengawas dan pemegang saham melalui forum resmi yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam forum tersebut, manajemen memaparkan laporan keuangan tahunan, kinerja operasional, serta hasil implementasi strategi bisnis yang telah dijalankan selama satu periode. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irna Puspasari Siregar mengatakan bahwa:

*“Semua laporan ini udah dicek sama auditor biar jelas dan nggak ngada-ngada. Selain buat ngevaluasi kerja direksi, RUPS juga jadi ajang dewan pengawas buat kasih masukan, saran, atau penilaian. Biasanya yang paling ditunggu-tunggu di RUPS itu soal pembagian laba alias dividen buat pemegang saham”.*⁷

Berdasarkan kutipan tersebut, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum resmi bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada dewan pengawas dan

⁷ Wawancara dengan . Ibu Irna Puspasari Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

pemegang saham. Dalam forum ini, manajemen memaparkan laporan keuangan tahunan, kinerja operasional, serta hasil strategi bisnis yang telah dijalankan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Pembagian dividen ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan finansial perusahaan, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan manajemen terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab kepada investor. Dengan demikian, mekanisme pelaporan melalui RUPS dan realisasi pembagian dividen menjadi bagian integral dari proses pertanggungjawaban korporasi, yang mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility adalah pertanggungjawaban perusahaan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk penerapan prinsip pertanggungjawaban Ibu Irna Pusparsi Siregar mengatakan bahwa:

“Biar semua kegiatan perusahaan nggak nyeleneh dan tetap sesuai aturan, perusahaan selalu berusaha nurutin hukum dan peraturan yang berlaku. Patuh aturan ini bukan cuma biar aman secara hukum, tapi juga bagian penting biar perusahaan tetap jalan dengan cara yang benar. Namun, BPRS Rajasa belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Good Corporate Governance yang secara khusus dan tertulis mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam manajemen risiko kredit.”⁸

⁸ Wawancara dengan Ibu Irna Pusparsi Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi secara dini potensi ketidaksesuaian atau deviasi dari kebijakan yang telah ditetapkan, serta segera melakukan tindakan korektif guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berdampak hukum maupun reputasional. Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui audit internal, evaluasi kinerja unit kerja, serta pelaporan periodik yang memungkinkan manajemen untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan operasional terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan sistem pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan, perusahaan tidak hanya mampu memitigasi risiko ketidakpatuhan, tetapi juga memperkuat legitimasi institusional di mata pemangku kepentingan dan regulator. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irna Pusparsi Siregar mengatakan bahwa:

“Sebagai bentuk peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar, perusahaan aktif jalanin yang namanya CSR. Isinya macam-macam, kayak bikin program biar ekonomi warga lebih maju, kasih bantuan pendidikan, jaga lingkungan, sampai bantu kesehatan dan kesejahteraan orang sekitar. CSR ini nggak cuma buat formalitas doang, tapi udah jadi bagian penting dari cara perusahaan jalanin bisnisnya biar bisa terus bertahan lama”.⁹

Bentuk nyata dari komitmen tersebut dapat terlihat pada kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan, salah satunya melalui program penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, serta

⁹ Wawancara dengan Ibu Irna Pusparsi Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

kesejahteraan masyarakat sekitar. Berikut adalah kegiatan penyerahan dana CSR yang dilaksanakan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah:¹⁰

Gambar 4.3 Kegiatan Penyerahan Dana CSR BPRS Rajasa Lampung Tengah



Sumber: Website Resmi BPRS Rajasa Lampung Tengah

Manajemen bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus memperkuat reputasi dan nilai perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Adapun Ibu Irna Puspasari Siregar mengatakan bahwa:

“Biar keputusan penting tetap fair, jujur, dan profesional, perusahaan bikin aturan kalau nggak boleh ada yang ikut campur, mau dari dalam atau luar. Semua keputusan dibahas bareng lewat rapat atau musyawarah, dan yang ikut ya orang-orang yang emang ngerti dan

¹⁰ BPRS Rajasa, t.t., diakses 3 September 2025, <https://bprsrajasa.co.id/pengumuman/>.

pegang tanggung jawab dibidangnya'.¹¹

Sebagai wujud implementasi prinsip independensi, perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun rapat manajemen secara rutin. Melalui forum ini, seluruh keputusan strategis dibahas bersama secara profesional dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik perusahaan serta bebas dari intervensi pihak luar.¹²

Gambar 4.4 RUPS Sebagai Bentuk Pengambilan Keputusan Secara Independen



Sumber : Website Kabupaten Lampung Tengah

Melalui pendekatan partisipatif ini, perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang valid, analisis yang komprehensif, serta pertimbangan kepentingan terbaik bagi keberlangsungan organisasi. Selain itu, dokumentasi hasil rapat dan notulensi keputusan menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses, sehingga seluruh langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Irna Puspasi Siregar, Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

¹²Kabupaten Lampung Tengah, diakses 4 September 2025, <https://web.lampungtengahkab.go.id/post/berita/index>.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan memberlakukan aturan internal yang mengatur secara tegas larangan terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irna Puspasari Siregar mengatakan bahwa:

“Mulai dari belanja barang dan jasa, kerja sama sama pihak yang masih ada hubungan nya itu mas, sampai bikin kebijakan penting, semuanya diatur. Orang-orang penting di perusahaan juga wajib lapor kalau punya kepentingan tertentu, dan itu diawasi sama tim kepatuhan atau audit internal.”¹³

Setiap keputusan dalam perusahaan harus diambil semata-mata untuk kepentingan dan keberlangsungan perusahaan, tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat merugikan reputasi maupun mengurangi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan prinsip objektivitas dan independensi dalam tata kelola perusahaan yang baik, di mana pengambilan keputusan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness merupakan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Ibu Irna Puspasari Siregar mengatakan bahwa:

“Biar usaha jalan adil dan bisa dipertanggungjawabin, perusahaan berkomitmen ngasih perlakuan yang sama dan seimbang buat semua pihak, mulai dari karyawan, nasabah, sampai pemegang saham. Keadilan ini keliatan dari kebijakan yang transparan, menghargai hak tiap orang, dan ngasih manfaat ekonomi sesuai

¹³ Wawancara dengan Ibu Irna Puspasari Siregar Selaku Direktur BPRS Rajasa Syariah Lmapung Tengah, 22 juni 2025

kontribusinya. Contohnyanya, tiap tahun perusahaan bagi jasa produksi atau dividen berdasarkan hasil kinerja keuangan, sesuai kesepakatan di RUPS, dan tetap patuh sama aturan hukum yang berlaku.”.¹⁴

Melalui mekanisme ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh pihak menerima haknya secara proporsional dan transparan, sehingga kepercayaan, loyalitas, dan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan dapat terus terjaga dan diperkuat dalam kerangka tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Dalam menangani keluhan atau pengaduan dari karyawan atau pihak eksternal secara adil dan transparan dengan menerima pengaduan dan membahas secara musyarakah dan memberikan informasi sesua meeting.

C. Manajemen Risiko Kredit Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah

Manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengertian macam-macam risiko, seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

Seluruh lembaga wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang

¹⁴ Ibid.

bersifat material. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro mengatakan bahwa:

“Di BPRS Rajasa terdapat produk tabungan sisa gaji yang memudahkan nasabah dalam mengatur keuangan, meskipun memiliki risiko karena tidak dilengkapi dengan perlindungan asuransi apabila nasabah meninggal sebelum mencapai target tabungan. Selain itu, tersedia pula produk pembiayaan khusus untuk aparatur kampung yang berpotensi menghadapi risiko kredit macet. Risiko tersebut ditangani melalui beberapa tahapan, mulai dari pemberian peringatan, koordinasi dengan bendahara kampung, penagihan kolektif, hingga langkah hukum apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban.”¹⁵

Skema pembiayaan aparatur kampung ini menjadi solusi keuangan syariah yang amanah dan produktif di lingkungan pedesaan. Dengan adanya kerja sama antara BPRS Rajasa, aparatur kampung, dan bendahara desa, risiko pembiayaan dapat ditekan, meskipun tetap perlu pengawasan aktif untuk mencegah dan menangani kredit macet.

Pemberian kredit harus melalui tahap evaluasi kredit, dimana bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C, yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economic*. Dengan beberapa penaganan kredit yang terjadi adalah salah satu upaya mengidentifikasi risiko kredit sehingga bank dapat memitigasi risiko tersebut.

1. *Character* (Karakter)

Character (karakter) merujuk pada penilaian terhadap kepribadian, integritas, dan reputasi moral calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Karakter mencerminkan sejauh mana niat dan komitmen

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro, Selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Syariah Lmapung Tengah, 22 juni 2025

nasabah untuk membayar utangnya tepat waktu, meskipun mungkin memiliki kemampuan finansial. Ini menjadi aspek penting karena risiko kredit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membayar, tetapi juga oleh kemauan untuk membayar.

Aspek character dalam manajemen risiko kredit merupakan salah satu faktor utama yang dinilai oleh lembaga keuangan sebelum memberikan fasilitas pinjaman. Character merujuk pada integritas, kejujuran, dan itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Penilaian aspek ini biasanya dilakukan melalui analisis rekam jejak debitur, seperti kedisiplinan dalam pembayaran cicilan sebelumnya, riwayat hubungan dengan lembaga keuangan, maupun reputasi di lingkungan sosial. Dengan menilai character, lembaga keuangan dapat memperkirakan tingkat risiko kredit macet yang mungkin terjadi, karena debitur dengan karakter baik cenderung memiliki komitmen tinggi untuk melunasi pinjamannya meskipun menghadapi kondisi keuangan yang sulit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro mengatakan bahwa:

“ya itu yang di bilang kamu barusan, adanya pengecekan slik, kan kamu pernah to PPL disini terus di suruh cek slik nasabah naa itu gunanya untuk liat data pembiayaan nasabah di tempat lain dan cek lingkungan sekitar usaha atau domisilinya itu yang di bilang kamu barusan, adanya pengecekan slik, kan kamu pernah to PPL disini terus di suruh cek slik nasabah naa itu gunanya untuk liat data pembiayaan nasabah di tempat lain dan cek lingkungan sekitar usaha atau domisilinya.”¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro, Selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Syariah Lmapung Tengah, 22 juni 2025

Dalam menilai karakter nasabah, pihak pembiayaan tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh nasabah secara lisan, tetapi menerapkan pendekatan verifikasi yang lebih komprehensif. Langkah-langkah tersebut meliputi pengecekan riwayat kredit melalui SLIK, penelusuran data pembiayaan di lembaga keuangan lain, serta survei langsung ke lingkungan tempat tinggal nasabah untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai reputasi dan integritasnya.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas mengacu pada kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban pembiayaan berdasarkan penghasilan yang dimilikinya. Aspek ini menilai sejauh mana pendapatan rutin nasabah mampu menutup cicilan pembiayaan yang diajukan. *Capacity* dalam manajemen risiko kredit merujuk pada kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Penilaian kapasitas biasanya dilakukan dengan menganalisis sumber penghasilan debitur, stabilitas pekerjaan atau usaha, serta konsistensi arus kas yang dimiliki. Melalui analisis tersebut, lembaga keuangan dapat menilai sejauh mana kemampuan debitur untuk membayar cicilan secara rutin tanpa mengganggu kebutuhan hidup pokok atau keberlangsungan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro mengatakan bahwa:

“Kita biasanya lihat dulu berapa banyak utang yang dipunya nasabah, terus kita bandingin sama penghasilannya tiap bulan. Kalau

utangnya udah numpuk dan penghasilannya pas-pasan, ya kita pikir-pikir lagi buat ngasih pinjaman. Tapi kalau penghasilannya stabil dan masih cukup buat nutup cicilan, berarti dia aman-aman aja buat kita kasih kredit. Intinya, kita pastiin dulu dia nggak keberatan bayar tiap bulan.”¹⁷

Penilaian kapasitas calon debitur dilakukan dengan pendekatan menyeluruh untuk memastikan kemampuan finansialnya dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Proses ini mencakup perhitungan total penghasilan bulanan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, penelusuran kewajiban atau utang yang masih berjalan di lembaga keuangan formal maupun non formal, serta analisis rasio antara total kewajiban dan penghasilan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa cicilan baru tidak akan memberatkan kondisi keuangan nasabah.

3. *Capital* (Kapital)

Kapital mengacu pada kekuatan finansial atau modal yang dimiliki nasabah sebagai bentuk komitmen terhadap usaha maupun tanggung jawab atas pembiayaan yang diajukan. Kapital menunjukkan seberapa besar ketahanan keuangan nasabah apabila menghadapi tekanan usaha atau penurunan pendapatan. Capital berfungsi sebagai indikator penting bagi lembaga keuangan dalam menilai tingkat kepercayaan terhadap debitur.

Modal yang memadai tidak hanya menggambarkan kapasitas finansial, tetapi juga mencerminkan keseriusan serta tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Oleh karena itu, analisis

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primantoro, Selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Syariah Lmapung Tengah, 22 juni 2025

terhadap capital menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit. Semakin kuat posisi permodalan yang dimiliki debitur, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan secara lebih aman dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro mengatakan bahwa:

“Ok kalo itu minta lihat pembukuan keuangan nasabah sama rekening koran mereka, biar tahu alur duitnya masuk dan keluar tiap bulan. Dari situ kelihatan, penghasilannya rutin atau nggak, ada tambahan pemasukan apa enggak, sama seberapa sering dia keluarin uang buat kebutuhan atau bayar utang. Kalau catatannya rapi dan penghasilan terlihat stabil di rekening, itu jadi tanda kalau dia punya kemampuan bayar yang baik. Tapi kalau catatannya berantakan atau rekeningnya sering kosong, ya kita jadi lebih hati-hati buat ngasih pinjaman.”¹⁸

Penilaian kapital oleh BPRS berperan penting dalam menilai kelayakan pembiayaan nasabah. Melalui evaluasi terhadap pembukuan keuangan yang rapi dan aktivitas rekening koran, BPRS dapat mengidentifikasi kemampuan nasabah dalam menjaga keberlangsungan usaha dan menghadapi risiko pembiayaan. Nasabah dengan kondisi keuangan yang sehat dinilai lebih mampu memenuhi kewajiban, sehingga penilaian kapital yang akurat membantu meminimalkan risiko gagal bayar akibat lemahnya modal atau ketiadaan dana cadangan.

4. *Colaterral (Angunan)*

Dalam manajemen risiko kredit, collateral atau agunan merupakan aset yang dijaminkan oleh nasabah sebagai bentuk pengamanan atas

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro, selaku kepala bagian pembiayaan BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

pembiayaan yang diberikan. Agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada lembaga keuangan sebagai bentuk pengaman apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Jaminan ini dapat berupa aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Keberadaan *collateral* memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan karena dapat dijadikan sumber pelunasan apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, jaminan juga berfungsi sebagai dorongan bagi debitur untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban kreditnya, karena adanya konsekuensi kehilangan aset yang dijaminkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro mengatakan bahwa:

*"Kita pastikan dulu nilai agunan yang diberikan nasabah sebanding dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Artinya, kalau sewaktu-waktu terjadi masalah, nilai jual agunan tersebut harus bisa nutup pinjaman. Selain itu, agunan juga dicek status hukumnya agar tidak dalam sengketa atau klaim pihak lain. Kalau nilainya sesuai dan statusnya aman, barulah agunan dianggap layak sebagai jaminan pinjaman."*¹⁹

Dalam manajemen risiko kredit, penilaian terhadap agunan menjadi aspek tambahan yang krusial untuk memperkuat keamanan pembiayaan dan mencegah terjadinya kredit bermasalah. Evaluasi

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro, selaku kepala bagian pembiayaan BPJS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

mencakup legalitas dokumen agunan, tingkat likuiditas atau kemudahan agunan untuk dijual kembali, lokasi dan kondisi fisik agunan, serta kejelasan status kepemilikannya. Penilaian yang cermat terhadap aspek-aspek ini membantu memastikan bahwa agunan benar-benar dapat dijadikan jaminan yang sah dan bernilai.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam manajemen risiko kredit, kondisi eksternal merupakan faktor penting yang perlu dianalisis untuk menilai keberlangsungan usaha nasabah. Faktor ini mencakup situasi ekonomi, sosial, dan regulasi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembayaran. kondisi ekonomi, industri, maupun situasi eksternal lain yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Faktor ini mencakup stabilitas ekonomi makro, perkembangan sektor usaha debitur, regulasi pemerintah, serta dinamika pasar yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penilaian terhadap *condition* penting dilakukan karena meskipun debitur memiliki karakter, kapasitas, modal, dan agunan yang baik, kondisi eksternal yang tidak mendukung dapat meningkatkan potensi risiko gagal bayar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primiantoro mengatakan bahwa:

“BPRS menilai kondisi ekonomi dan usaha nasabah, apakah masih berpeluang berkembang atau justru menurun. Jika omzet stabil atau meningkat, cicilan diperkirakan lancar, namun bila usaha lesu akibat kondisi ekonomi, perlu dipertimbangkan kembali. Intinya, usaha nasabah harus memiliki prospek agar pinjaman aman bagi kedua belah

pihak.”²⁰

Penilaian kondisi eksternal dilakukan untuk melihat keberlanjutan usaha nasabah dengan mempertimbangkan faktor ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta kondisi geografis dan sosial.

D. Pembahasan

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS Rajasa Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui lima pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Transparansi diwujudkan dengan penyediaan informasi material melalui media digital maupun cetak untuk mencegah asimetri informasi, meskipun masih terkendala koordinasi antarunit dan keterbatasan media penyampaian. Akuntabilitas tercermin dari struktur organisasi dan job description yang jelas, penggunaan *Key Performance Indicators* (KPI), serta pelaporan kinerja melalui RUPS yang disertai audit independen. Pertanggungjawaban juga terlihat dari kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan program CSR yang terintegrasi dengan strategi keberlanjutan perusahaan.

Independensi diterapkan melalui pengambilan keputusan kolektif yang bebas dari intervensi dan pencegahan konflik kepentingan, sedangkan prinsip kewajaran diwujudkan dengan pemberian perlakuan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam pembagian dividen dan mekanisme penyelesaian keluhan secara musyawarah. Dalam manajemen risiko

²⁰ Wawancara dengan Bapak Arif Yuli Primantoro, Selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, 22 juni 2025

pembiayaan, BPRS Rajasa menggunakan prinsip 5C dengan koordinasi CRM dan RM. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan SDM, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan belum adanya sistem peringatan dini. GCG efektif menekan risiko pembiayaan pada BPRS, namun menghadapi hambatan pada kualitas SDM dan independensi.

1. Transparansi (*Transparency*)

Berdasarkan teori, transparansi ialah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi menjadi pilar esensial dalam BPRS Rajasa Syariah, terutama perbankan syariah, karena memastikan kejelasan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah dan pihak bank. Ketika syarat pembiayaan, risiko, hak, dan kewajiban dijelaskan secara terbuka, nasabah mampu memahami akad dengan menyeluruh. Ini mendukung analisis terhadap karakter (*Character*) dan kondisi (*Condition*) nasabah agar lebih mendasar dan objektif mewujudkan prinsip kehati-hatian yang diharapkan.

Keterbukaan informasi juga memperkuat validitas analisis BPRS Rajasa Syariah dalam mengevaluasi nasabah. Data akurat tentang riwayat usaha, kondisi pasar, hingga prospek bisnis memungkinkan penilaian risiko lebih komprehensif dan transparan. Selain memperkuat analisis internal, transparansi juga menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap

²¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020. 127.

lembaga. Ketika informasi disampaikan secara jujur dan terbuka, nasabah merasa diperlakukan secara profesional dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), di mana transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun integritas dan hubungan baik dengan publik.

2. Kemandirian (*Independency*)

Berdasarkan teori, kemandirian ialah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi dalam pengambilan keputusan kredit sangat penting untuk memastikan bahwa analisis karakter (*Character*) dan agunan (*Colaterral*) nasabah dilakukan secara objektif, tanpa adanya tekanan dari pihak luar atau konflik kepentingan internal. Dengan independensi, evaluator dapat fokus menilai kelayakan kredit berdasarkan data nyata dan prosedur yang jelas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen meningkatkan kredibilitas pengawasan syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Selain dalam konteks syariah, independensi terbukti penting secara luas dalam menjaga kualitas institusi keuangan. BPRS Rajasa Syariah dengan komite audit dan risiko yang lebih independen menunjukkan kinerja lebihbaik. Ini menegaskan bahwa independensi bukan sekadar

²² Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020. 127.

prinsip tata kelola, tapi juga instrumen praktis untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas keputusan keuangan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*),

Berdasarkan teori, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam evaluasi kapasitas (*Capacity*) pembayaran nasabah diwujudkan lewat pembagian tugas yang jelas antar unit mulai dari analis kredit hingga pengambil keputusan akhir yang memastikan proses berjalan sesuai prosedur dan menghindari bias subjektif. Struktur seperti ini menegaskan tanggung jawab setiap pihak dan memperkuat objektivitas dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Sistem *Key Performance Indicator* (KPI) menjadi alat utama dalam menjaga objektivitas akuntabilitas tersebut. KPI menghadirkan tolok ukur kinerja yang terukur bagi setiap pegawai sehingga kinerja dapat dimonitor dan dievaluasi secara kuantitatif. Lebih dari sekadar kontrol internal, akuntabilitas melalui pembagian tugas yang tegas dan KPI juga membantu membangun kepercayaan dari nasabah. Ketika proses evaluasi dilakukan secara sistematis dan transparan, nasabah merasa bahwa penilaian dilakukan secara adil dan profesional. Hal ini penting untuk menjaga hubungan jangka panjang dan reputasi lembaga keuangan.

²³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020. 127.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Berdasarkan teori, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.²⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban dalam BPRS Rajasa Syariah sangat penting, yang tercermin lewat verifikasi modal dan agunan (*Colaterral*) sesuai ketentuan hukum. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan memiliki jaminan yang sah dan relevan, sehingga dapat meminimalkan potensi gagal bayar. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dalam operasional bank syariah.

Lebih lanjut, mekanisme verifikasi agunan sebagai bagian dari pertanggungjawaban berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko yang efektif. Verifikasi ini memastikan bahwa nilai jaminan valid dan seimbang dengan kapasitas modal nasabah, sehingga risiko kredit menurun. Penerapan pertanggungjawaban dalam bentuk verifikasi agunan terbukti menekan rasio pembiayaan bermasalah dengan memperkuat dasar

²⁴ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020. 127.

objektivitas dan akuntabilitas dalam keputusan pembiayaan

5. Kewajaran (*Fairness*)

Berdasarkan teori, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajaran dalam penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) memastikan bahwa seluruh nasabah BPRS Rajasa Syariah mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang sosial maupun kedekatan personal. Penilaian kelayakan kredit dilakukan secara objektif.

Berdasarkan kriteria yang sama, sehingga menjaga integritas dan keadilan dalam proses pembiayaan. Kewajaran juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko pembiayaan. Perlakuan yang adil dan konsisten membangun kepercayaan nasabah serta menumbuhkan kepatuhan terhadap perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi diperoleh gambaran `bahwa temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan GCG di BPRS efektif menurunkan

²⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020. 127.

risiko pembiayaan, namun masih terkendala pada aspek independensi dan kualitas SDM pengelola risiko, serta penelitian yang menegaskan peran besar transparansi dan akuntabilitas dalam efektivitas manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, meskipun penerapan teknologi informasi yang belum optimal menjadi hambatan utama. Dengan demikian, penerapan GCG menjadi kerangka utama yang mendukung efektivitas manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa, meskipun optimalisasi SDM, teknologi deteksi dini, dan sistem informasi manajemen risiko tetap diperlukan untuk meningkatkan pengendalian risiko secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS Rajasa Lampung Tengah telah terlaksana melalui lima pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran yang mendukung efektivitas pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Meskipun penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen risiko kredit di BPRS Rajasa Lampung Tengah telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal. Di antaranya adalah belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) GCG secara tertulis dan terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang manajemen risiko kredit, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam mendekripsi potensi kredit macet sejak dulu. meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta belum tersedianya sistem peringatan dini, sehingga diperlukan penguatan pada aspek SDM dan teknologi agar tata kelola ke depan lebih berkelanjutan dan efektif.

B. Saran

Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Rajasa Lampung Tengah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin mengenai prinsip GCG dan manajemen risiko kredit, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam deteksi dini pembiayaan bermasalah.
2. Penguatan Kompetensi SDM BPRS Rajasa perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif mengenai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan teknik manajemen risiko kredit, agar setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama dan mampu menerapkannya secara konsisten.
3. Optimalisasi Transparansi Informasi, bank perlu memperluas aksesibilitas informasi terkait produk, syarat pembiayaan, risiko, dan laporan keuangan melalui media digital resmi yang mudah diakses nasabah, sehingga prinsip transparansi benar-benar mendukung mitigasi risiko kredit.
4. Penerapan *Early Warning System*, penting bagi BPRS Rajasa untuk membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis teknologi, yang dapat mendeteksi gejala awal kredit bermasalah sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Amelinda, Tiara Novia, dan Moch Khoirul Anwar. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 33–44. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p33-44>.
- Andrianto, dkk. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arijanto, Agus. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ascarya, dan Yumanita, Diana. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Pendekatan Praktik dan Teori*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- B. M., Nurid Fadhilatul, Hanani, Nurul, dan Estiningrum, Sri Dwi. "Penerapan Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah." *Wadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli 2018.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- BPRS Rajasa, "produk" t.t. Diakses 16 Agustus 2025. <https://bprsrajasa.co.id/produk/>.
- BPRS Rajasa, "Pengumuman." t.t. Diakses 3 September 2025. <https://bprsrajasa.co.id/pengumuman/>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020.
- Dewi, Dennisha Amalia. Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Fitri, Nila Umailatul. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hasanah, Umi, dan Andri Wibowo. *Good Corporate Governance* dan Implikasinya terhadap Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 10, no. 1, 2022.

Iswara, Wayan Gde. Manajemen Risiko untuk Lembaga Keuangan dan Bank. Yogyakarta: Andi Publisher, 2016.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Edisi Revisi 2021.

Mahmud. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2021.

Misra, Isra, Sofyan Hakim, dan Agus Pramana. Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah. Yogyakarta: K-Media, Graha Ilmu, 2020.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Nanda, Firda Eka, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Ashlihah. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah di Dalam Koperasi Syariah." *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022): 46.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SE OJK No. 13/SEOJK.03/2015.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: OJK, 2021.

Pramanaswari, A.A. Sagung Istri. "Analisis Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023." *JURNAL ECONOMINA* 3, no. 6 (2024): 683–92. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1343>.

Rheza, Pratama. Pengantar Manajemen. Sleman: Deepublish, 2020.

Riska, Franita. Mekanisme Corporate Governance dan Nilai Perusahaan. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Aqli, 2019.

Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Sari, Indah Permata. "Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan." Juripol, Vol. 4, No. 1, 2021.

Sugiharto, Bambang. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Risiko Bank Syariah." Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 2, 2011.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sugiyono. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suharputra, Uhar. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Titania, Helin, dan Salma Taqwa. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 5, no. 3 (2023): 1224–38. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.795>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1459/ln.28.1/J/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Agus Trioni Nawa (Pembimbing 1)
Agus Trioni Nawa (Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM	: 2103021031
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah
Judul	: IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA SYARIAH LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

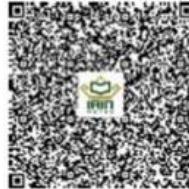
1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Juni 2025

Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng
NIP 199005082020121011

OUTLINE

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA SYARIAH LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Good Corporate Governance (GCG)*
 - 1. Pengertian *Good Corporate Governance*
 - 2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
 - 3. Penerapan *Good Corporate Governance*
- B. Manajemen Risiko Kredit
 - 1. Pengertian Manajemen Risiko Kredit
 - 2. Klasifikasi Risiko Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

3. Peran *Credit Risk Management* (CRM) dan *Relationship Management* (RM) dalam Pengendalian Risiko Kredit

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

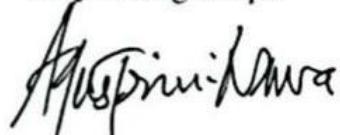
- A. Hasil
 - 1. Gambaran Umum BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah
 - 2. Implementasi Prinsip Good Corporate Governance BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah
 - 3. Manjemen Risiko Kredit Pada BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Menyetujui,
Pembimbing Skripsi



Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Metro, Juli 2025
Mahasiswa



Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031

ALAT PENGUMPULAN DATA

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA SYARIAH LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara Kepada Pihak Manajerial BPRS Rajasa Syariah Terkait Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Prinsip Transparasi (transparency)
 - a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan resmi terkait keterbukaan informasi? Jika ya, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan?
 - b. Informasi apa saja yang wajib disampaikan kepada pemangku kepentingan, dan bagaimana cara penyampaiannya?
 - c. Bagaimana perusahaan memastikan informasi yang disampaikan akurat, lengkap, dan tepat waktu?
 - d. Melalui media apa saja perusahaan menyampaikan informasi kepada publik atau nasabah?
 - e. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga transparansi, dan bagaimana perusahaan mengatasinya?
2. Prinsip Akuntabilitas (accountability)
 - a. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan?
 - b. Apa mekanisme pelaporan kinerja yang digunakan oleh manajemen?
 - c. Bagaimana perusahaan memberikan pertanggungjawaban atas kinerja kepada dewan pengawas atau pemilik?
 - d. Apa langkah yang diambil jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan tugas?
3. Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility)
 - a. Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku?
 - b. Apa langkah konkret yang dilakukan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?

4. Prinsip independensi (independency)
 - a. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun?
 - b. Apakah ada kebijakan atau mekanisme untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan?
5. Prinsip kewajaran (fairness)
 - a. Bagaimana perusahaan menjamin perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, nasabah, dan pemegang saham?
 - b. Apa kebijakan perusahaan dalam menangani keluhan atau pengaduan dari karyawan atau pihak eksternal secara adil dan transparan?

B. Terkait Manajemen Risiko Kredit

1. Character (Karakter)

Bagaimana perusahaan menilai reputasi dan integritas calon debitur sebelum kredit disetujui?

2. Capacity (Kapasitas)

Apa yang menjadi dasar penilaian kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman?

3. Capital (Kapital)

Bagaimana perusahaan menilai kekuatan modal atau kondisi keuangan calon debitur?

4. Colaterral (Angunan)

Apa kriteria utama dalam menilai kelayakan agunan yang diajukan oleh debitur?

5. Condition (Kondisi Eksternal)

Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi atau sektor usaha calon debitur dipertimbangkan dalam proses pemberian kredit?

C. Wawancara Kepada Nasabah BPRS Rajasa Syariah

1. Pengalaman dan Persepsi terhadap Bank

- a. Sejak kapan Anda menjadi nasabah BPRS Rajasa?
- b. Apa alasan Anda memilih BPRS Rajasa sebagai lembaga pembiayaan?

- c. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak bank selama ini?
- d. Apakah pihak bank menjelaskan secara jelas dan transparan mengenai produk dan risiko pembiayaan?

2. Terkait Proses Pembiayaan

- a. Bagaimana proses pengajuan dan pencairan pembiayaan menurut anda?
- b. Apakah pihak bank melakukan analisis atau survei sebelum memberikan pembiayaan?
- c. Apakah ada pendampingan atau evaluasi setelah pembiayaan diberikan?

3. Persepsi terhadap Good Corporate Governance

- a. Apakah anda merasa pihak bank bersikap adil dan profesional dalam pelayanan?
- b. Apakah anda merasa informasi yang disampaikan oleh bank sudah transparan dan mudah dipahami?
- c. Apakah pernah mengalami kendala atau ketidaksesuaian dalam proses pembiayaan? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?

D. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang profil BPRS Rajasa Lampung Tengah
2. Dokumentasi laporan tata kelola BPRS Rajasa Lampung Tengah
3. Dokumentasi dengan karyawan BPRS Rajasa Lampung Tengah

Menyetujui,
Pembimbing Skripsi



Agus Trioni Nawa, M.Pd.
NIDN. 2012089001

Metro, Juli 2025
Mahasiswa



Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0198/ln.28/J/TL.01/02/2025
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPRS Rajasa Syariah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Pimpinan BPRS Rajasa Syariah berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM	: 2103021031
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah
Judul	: IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO (Studi kasus BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah)

untuk melakukan prasurvei di BPRS Rajasa Syariah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Pimpinan BPRS Rajasa Syariah untuk terselenggaranya prasurvei tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Februari 2025

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



Bandar Jaya, 26 Mei 2025

No. : 186/RJSLT/DIR/V/2025

Lamp. :

Hal : **Balasan Izin Pra Survey**

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Menindaklanjuti surat nomor : B-0198/In.28/J/TL.01/02/2025 Perihal Izin Pra Survey atas nama :

Nama : Raka Tri Oktaf Putra

NPM : 2103021031

Status : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Judul : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan
Manajemen Risiko (Studi Kasus PT. BPRS Rajasa Lampung tengah (Perseroda)

Dengan Ini kami memberikan Izin untuk melakukan Pra survey sesuai dengan judul Skripsi yang akan di ambil pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah (Perseroda).

Demikian Surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah (Perseroda)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1646/ln.28/D.1/TL.00/08/2025

Lampiran :-

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,

Pimpinan BPRS Rajasa Syariah

Lampung Tengah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1647/ln.28/D.1/TL.01/08/2025,
tanggal 05 Agustus 2025 atas nama saudara:

Nama	:	RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM	:	2103021031
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survei di BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA SYARIAH LAMPUNG TENGAH**".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Agustus 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1647/ln.28/D.1/TL.01/08/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RAKA TRI OKTAF PUTRA
NPM : 2103021031
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survei di BPRS Rajasa Syariah Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA SYARIAH LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-727/ln.28/S.U.1/OT.01/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAKA TRI OKTAF PUTRA

NPM : 2103021031

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103021031.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH**

untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Oktober 2025
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec
NIP.199005082020121011



Bimbingan dan Dukungan

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS	: 629129
Nama BPRS	: PT BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH (Persero)
Jenis BPRS	: BPRS B
Tahun	: Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,86	Baik
Analisis	
<p>Dari hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola PT BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Persero) diperoleh peringkat 2 (Dua) atau Baik, mencerminkan manajemen BPR Syariah telah melaksanakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada aspek Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome secara memadai dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha BPR Syariah. Namun secara struktur organisasi, BPR Syariah masih belum lengkap pada fungsi yang signifikan yaitu kekosongan pengurus 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah pasal 9, BPR Syariah masih berupaya melengkapi kekosongan tersebut. Setiap unit kerja BPR Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. BPR Syariah secara conditione dan konsisten terus melakukan review dan evaluasi dalam rangka upaya peningkatan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja pada BPR Syariah. Proses pengunjukpan dan transparansi informasi, data dan laporan masih dilakukan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR Syariah juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BPR Syariah dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada stakeholders. Ditengah kondisi persaingan pasar dengan bank lain, BPR Syariah seharusnya berupaya seoptimal mungkin agar pencapaian kinerja selalu konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta prinsip Syariah. BPR Syariah akan terus melakukan perbaikan pada penerapan tata kelola, terutama berkaitan pengendalian intern, termasuk didalamnya peningkatan pemahaman tentang tata kelola dan manajemen risiko yang baik untuk semua unit kerja yang ada pada BPR Syariah Rajasa.</p>	

Bandarjaya, 21 Januari 2025

PT BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Persero)

Direktur Utama

Komisaris Utama



HERIANTO, S.H.,M.H

NIRLAN, S.H.,M.M

PT BPR Syariah Rajasa (Persero)
Jl. Pemuda No. 22
Kota Jayapura - Lampung Tengah
Telp. 031-4123222
www.bprrajasa.co.id





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA :

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Mei 2015	<p>Perifontan implementasi gg dalam manajemen Bisnis pembelikan dagang.</p> <p>- dg implementasi gg - dg hubungannya dengan manajemen risiko</p> <p>Metode</p> <p>- Studi kasus (casian) - sumber primer siapa dan apa? - sekunder siapa dan apa? - bwhr apa yang diperlukan - apa yang dibutuhkan</p>	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Triono Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA : 8

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/5/2025	Acc proposal <u>Dafatar Seminar</u>	A.S.

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Triono Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA :

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Juli 2025	<p>Implementasi GCC dalam Manajemen risiko kredit</p> <p>B. 1. A. FASIL 1. Cukuran (otari perlindungan a. jasne b. --)</p> <p>2. Implementasi minimal pada d. transparansi b. --</p> <p>3. Manajemen risiko kredit pada a. -- b. --</p> <p><u>B PEMBAHASAN</u></p> <p>Andi pahami Variabelnya, tentukan tujuan caranya.</p>	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA : 9

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen		
	13/ Agustus 2025	<p>1. Buat script wawancara</p> <table border="1"><tr><td>Peranyaan</td><td>Jawaban</td></tr></table> <p>2. Bentuk analisisnya di sertakan butuh dulu</p> <p>"Wawancara</p> <p>italic</p> <p>3. Sjideksripsi</p>	Peranyaan	Jawaban	
Peranyaan	Jawaban				

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Triono Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA :

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24 / Agustus 25	<p>Adapun amanah pertanyaan Saya, untuk selebihnya fokus pada penjabaran dari penulis.</p> <p>Elaborasi dan kembali ketiga wawancaranya</p> <p>Pembahasan ditambah lagi.</p>	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra **Jurusan : Perbankan Syariah**
NPM : 2103021031 **Semester/TA :**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 Agustus 20	<p>prinsip GCG</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 trans 2 Independ 3 tanggung jawab 4 ketepatan 5 kerujukan <p>manaj. Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Charater 2. Capital 3. Capacity 4. G Referal 5. Conduct <p>By mukhlis.</p>	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Yhs

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA :

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/08/2023	- keruangan pembelaan - kesimpulan: menjawab pertanyaan penelitian - Bawa Abstrak. 175 - 250 Kata.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Triono Nawa, M.Pd.

NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra

NPM. 2103021031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raka Tri Oktaf Putra
NPM : 2103021031 Jurusan : Perbankan Syariah
Semester/TA :

NO	Hari/Tgl	. Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	03/sep/2015	- ditanyai mengenai hal - dokumen yang pembawa dari website disertasi lindayya / w2 diminta ke dalam footnote.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Trioni Nawa, M.Pd.
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Raka Tri Oktaf Putra
NPM. 2103021031

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Raka Tri Oktaf Putra dilahirkan pada tanggal 01 Oktober 2002 di Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Joko Sundari dan Ibu Mursiami. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 3 Gunung Madu dan selesai pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Satya Dharma Sudjana dan selesai pada tahun 2018, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Aku Cinta Indonesia Metro dan selesai pada tahun 2021. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2021. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Risiko Kredit Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah”